



## Manajemen Strategis pada Sektor Publik di Provinsi Sulawesi Tenggara

La Ode Fasikin<sup>1</sup>, Syaifudin Suhri Kasim<sup>2\*</sup>, La Ode Abdul Harlan<sup>3</sup>,  
Maudhy Satyadharma<sup>4\*</sup>

<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari

<sup>4</sup>Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara, Kendari

\*e-mail korespondensi penulis: [maudhymaudhy@gmail.com](mailto:maudhymaudhy@gmail.com)

---

### Abstract

*This study aims to examine the implementation of strategic management in the public sector of Southeast Sulawesi Province, particularly within the scope of the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law, and Politics of Southeast Sulawesi Province. This study employs a qualitative research approach, utilizing a descriptive method. The purpose of explanatory research is to describe problem-solving in accordance with existing facts systematically and accurately. The results of the study found that the implementation of strategic management is closely related to the current state of ASN. Effective strategic management can provide clear direction, enhance competence, and motivate ASN to work more efficiently. However, challenges in strategic management, such as rigid bureaucracy and resistance to change, also reflect various issues faced by ASN. To optimize ASN performance, it is necessary to implement strategic management, as well as adequate support in dealing with change. This has been done slowly but surely within the scope of the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law, and Politics of Southeast Sulawesi Province.*

**Keywords:** State Civil Apparatus, Strategic Management, Performance

### Abstrak

Penelitian ini berupaya menyoroti penerapan manajemen strategis pada sektor publik di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada lingkup Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan manajemen strategis memiliki keterkaitan yang erat dengan keadaan ASN saat ini. Manajemen strategis yang baik dapat memberikan arah yang jelas, meningkatkan kompetensi, dan memotivasi ASN untuk bekerja lebih efektif. Namun, tantangan dalam manajemen strategis, seperti birokrasi kaku dan resistensi terhadap perubahan, juga mencerminkan berbagai isu yang dihadapi oleh ASN. Untuk mengoptimalkan kinerja ASN, diperlukan penerapan manajemen strategis, serta dukungan yang memadai dalam menghadapi perubahan dan hal itu sudah dilakukan secara perlahan tapi pasti di lingkup Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Kata kunci:** Aparatur Sipil Negara, *Manajemen Strategis*, *Kinerja*

---

## 1. Pendahuluan

Dalam era penerapan tata kelola organisasi yang berkualitas, suatu organisasi publik yang bersifat *non profit oriented* dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Pencapaian kualitas layanan serta peningkatan kinerja organisasi mengarah pada pencapaian *good governance* (Rahmawati et al., 2019). Hal ini menggambarkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi publik termasuk yang bersifat *non profit oriented* sehingga tata kelola organisasi yang berkualitas menjadi sangat penting terutama dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi operasionalnya (Oja, 2016; Rahmawati et al., 2019).

Kualitas pelayanan diyakini sebagai salah satu indikator *good governance* karena akan mencerminkan tingginya kepuasan masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat atau public dan peningkatan kepercayaan masyarakat atau public kepada pemerintah. Penerapan *good governance* menerapkan beberapa prinsip didalamnya yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip partisipasi dan prinsip responsivitas.

Pencapaian *good governance* tidak akan berjalan dengan baik jika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki kinerja yang diharapkan. ASN merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah serta menjadi kunci dalam perwujudan kebijakan pemerintah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga fungsi ini menuntut ASN untuk memiliki kinerja baik, kompetensi, integritas serta dedikasi yang tinggi.

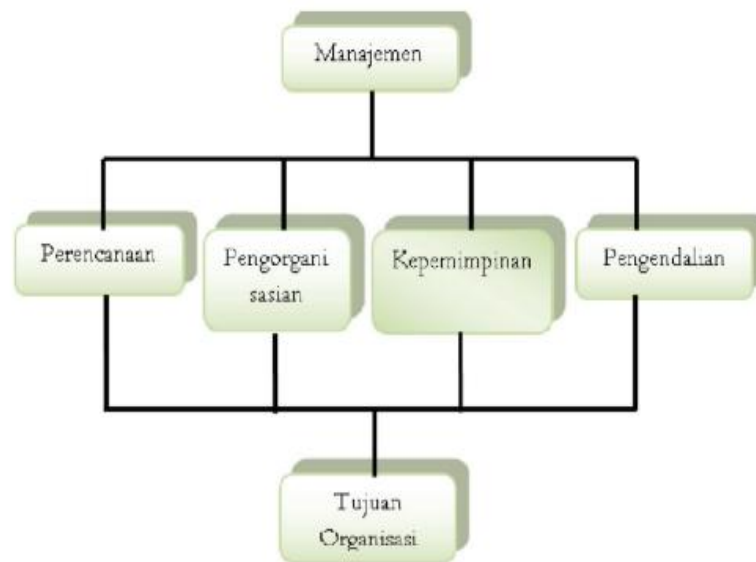
Hal itu juga diyakini oleh (Kadarisman, 2019; Kalangi, 2015) yang menyatakan bahwa ASN sebagai sumber daya manusia adalah faktor yang sangat sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuan, dimana organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Sumber daya manusia digunakan secara signifikan sebagai penggerak sumber daya lain dan memiliki posisi strategis yang berkontribusi untuk mewujudkan kinerja organisasi perusahaan dengan keunggulan kompetitif (Hasina & Satyadharma, 2023; Kalangi, 2015).

Organisasi publik juga memerlukan pengelolaan dan manajemen yang baik agar mencapai kualitas layanan. Keberhasilan layanan organisasi publik diukur melalui efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu organisasi publik harus menetapkan indikator-indikator dan target pengukuran kinerja yang berorientasi kepada masyarakat (Setijabudi, 2010).

Menurut Muliadi (Setijabudi, 2010), manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting). Setiap organisasi harus menjalankan setiap tahapan manajemen untuk mencapai tujuan. Ilmu manajemen terus menerus berkembang sehingga memiliki beragam cabang dan beberapa kajian yang bersifat khusus seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia,

manajemen produksi, manajemen transportasi dan muncul kajian khusus yang lain yaitu manajemen strategis (Ilyas et al., 2023; Listiani, 2011).

Peter (Yunus, 2016) menjelaskan bahwa pada perusahaan privat, manajemen stratejik merupakan upaya untuk merumuskan visi, misi dan strateji yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Kemampuan menerapkan manajemen stratejik yang diterapkan perusahaan ternyata dapat membawa perusahaan mampu mencapai tujuan yang diinginkan (Suaedi, 2019). Hal tersebut mendasari organisasi publik mulai menerapkan manajemen strategis di seluruh aspek kegiatannya (Yulianti, 2018). Hal itu dijelaskan dalam gambar 1 berikut:



**Gambar 1 Peran Manajemen dalam Organisasi**  
**Sumber : Peter (Yunus, 2016)**

Organisasi publik mempunyai karakteristik yang berbeda dari organisasi privat. Berikut ini beberapa karakteristik menurut Anthony dan Young (Salusu, 2004) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: 1) Tidak memiliki motif utama dalam mencari keuntungan, 2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak, 3) Ada kecenderungan berorientasi semata mata pada pelayanan publik, 4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strateji, 5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan, 6) Dominasi profesional, 7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.

Urgensi utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam organisasi sektor publik adalah membantu organisasi sektor publik merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi pengelolaan pada instansi sektor publik di era global yang terus mengalami perubahan. Dasar manajemen strategi adalah menumbuhkan komitmen atau dukungan dari semua pihak (sumber daya manusia) mengenai visi, misi



organisasi sektor publik, sasaran penyelenggaraan, dan upaya-upaya pencapaiannya (Faujiah et al., 2023; Ismail, 2021).

Hal itu juga dijelaskan bahwa manfaat dari manajemen strategis baik pada organisasi publik maupun organisasi non publik adalah mampu menghasilkan keputusan terbaik dalam organisasi, merumuskan strategi dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi berbagai kendala atau tantangan, mendorong keterlibatan karyawan dalam merumuskan strategi sehingga akan berimplikasi pada penghargaan produktivitas dan motivasi kerja (Ismail, 2021; Ramli & Kartini, 2023). Selain itu manfaat selanjutnya adalah mendorong organisasi lebih sensitive terhadap ancaman eksternal, membantu mencegah berbagai masalah internay dan eksternal, membuat proses operasional organisasi lebih efektif dan efisien, membantu organisasi untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin akan dihadapi (Ismail, 2021; Listiani, 2011).

Kebutuhan penerapan manajemen strategis dalam mendorong pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur (ASN) adalah dalam rangka mengelola tata kelola SDM dan menghasilkan ASN yang berkinerja baik serta memiliki kompetensi yang diharapkan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat (Almashyakhi, 2022; Dewie Tri Wijayati, 2010; Fathya, 2017; Kadarisman, 2019; Oja, 2016; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Masih banyak gambaran di masyarakat dan catatan dalam beberapa penelitian yang menjelaskan banyak pegawai pemerintah (ASN) yang belum bekerja dengan baik dan maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat, selain itu aspek manajemen belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip managerial terutama jika dilihat dari mekanisme fungsi-fungsi pada masing-masing unit kegiatan dalam organisasi bahkan sering terjadi banyak keluhan dari masyarakat karena masih sangat rendahnya koordinasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Akhmad, 2017; Dewie Tri Wijayati, 2010; Kadarisman, 2019; Lapalelo et al., 2024; Siswoyo et al., 2020).

Kantor Staff ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sultra memiliki tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada urusan pemerintahan, hukum dan politik di daerah (Sulawesi Tenggara) terutama dalam membantu Gubernur dan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja instansi pemerintah daerah, terutama dalam konteks perbaikan layanan publik. Dukungan yang diberikan oleh staf ahli ini dapat mencakup berbagai aspek, yang berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Beberapa peran strategis dimainkan oleh Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya Penyusunan Kebijakan dan Regulasi yang tepat, Pendampingan dan Pengawasan Implementasi Kebijakan, mendorong peningkatan kapasitas SDM, mendorong sinergi dan kolaborasi antar instansi, serta menjadi bagian dari mendorong transformasi digital pada instansi pemerintah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada secara sistematis dan akurat (Sugiyono, 2019). Langkah- langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini telah dilaksanakan di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara khususnya pada kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dan OPD lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara yang terkait dengan topic penelitian terutama dalam memotret penerapan manajemen strategis yang dilakukan sehingga mampu berkontribusi dalam mendorong peningkatan kinerja instansi public di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.

.Adapun informan berjumlah 5 orang dan akan diuraikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Yuni Nurnilawati, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara
2	Dr. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Sumanto, SH	Staf pada kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Hermina, S.Sos	
5	Sulastri, S.Ip	
6	Mijaya	
7	Udin	

Sumber : Data Primer (2025)

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Keterkaitan antara penerapan manajemen strategis dengan keadaan ASN dan berimplikasi pada dukungan kinerja instansi sektor publik

Penerapan manajemen strategis dalam sektor publik memiliki peran penting dalam membentuk keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendukung kinerja organisasi publik secara keseluruhan (Prastiwi & Meirinawati, 2016). Manajemen strategis yang efektif tidak hanya memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi ASN tetapi juga mendorong peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan public (Rosiadi et al., 2018).

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan, sebagai abdi negara dan masyarakat, yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 (Lapalelo et al., 2024). ASN adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan karena berbagai peran yang dijalankan sehingga sangat dibutuhkan kinerja yang baik (Kalangi, 2015).

Sebagai ujung tombak dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, penelitian ini menemukan bahwa peran-peran yang dimainkan oleh ASN terutama di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana kebijakan publik  
ASN bertanggung jawab dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi suatu tindakan nyata di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ASN lah yang memastikan bahwa program pemerintah yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Pelayan publik  
Sebagai pelayan publik, ASN berperan dalam memberikan layanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti layanan administrasi umum, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial ekonomi dan lain sebagainya. Efektivitas dan kualitas pelayanan public yang diterima oleh masyarakat sangat bergantung pada kinerja ASN.
- c. Penjaga stabilitas dan ketertiban  
ASN juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Dalam banyak kegiatan yang mendukung keamanan dan ketertiban di masyarakat, peran ASN sangat dibutuhkan di tengah masyarakat.
- d. Penggerak Pembangunan  
ASN juga berkontribusi dalam proses pembangunan di berbagai sektor. Mereka tidak hanya melaksanakan proyek pembangunan fisik, tetapi juga menjadi agen dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi dan sosial.
- e. Penegak hukum dan regulasi  
Sebagai bagian dari pemerintahan, ASN turut serta dalam memastikan bahwa penegakan hukum dan implementasi regulasi yang berlaku. ASN juga yang membantu memastikan bahwa peraturan yang ada telah dilaksanakan secara konsisten dan adil, baik dengan penegakan hukum yang bersifat *soft dan hard enforcement law*.

Kantor Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan manajemen strategis sangat dikorelasikan dengan keadaan ASN yang ada sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja ASN itu sendiri. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam kerangka manajemen strategis diantaranya :

- a. Penetapan visi dan misi dalam memotivasi ASN  
Visi dan misi yang ditetapkan dalam manajemen strategis memberikan panduan yang jelas bagi ASN mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi publik. Visi yang kuat dan misi yang jelas memberikan makna dan tujuan dalam pekerjaan ASN, yang dapat meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. ASN yang memahami dan terlibat dalam pencapaian visi organisasi cenderung lebih

termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik, yang pada gilirannya mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

b. Analisis lingkungan untuk mengoptimalkan potensi ASN

Manajemen strategis melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang memungkinkan organisasi publik untuk memahami potensi dan keterbatasan ASN. Dengan pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan internal, organisasi dapat merancang strategi yang memanfaatkan potensi ASN secara optimal. Misalnya, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, ASN dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan baru yang diidentifikasi dalam analisis lingkungan eksternal, seperti perubahan regulasi atau kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Pemahaman ini juga membantu organisasi publik dalam menempatkan ASN pada posisi yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahliannya, yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.

c. Implementasi Strategi yang mendukung adaptabilitas ASN

Penerapan strategi dalam organisasi publik sering kali melibatkan perubahan struktural, prosedural, dan operasional yang signifikan. ASN adalah aktor utama yang melaksanakan strategi-strategi ini, sehingga keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan. Manajemen strategis yang baik akan memperhatikan kebutuhan ASN selama proses perubahan, termasuk melalui pelatihan, komunikasi yang efektif, dan dukungan manajemen perubahan. Dengan demikian, ASN yang mampu beradaptasi dengan strategi baru akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja organisasi publik.

d. Evaluasi dan Kontrol dalam peningkatan akuntabilitas ASN

Manajemen strategis juga melibatkan proses evaluasi dan kontrol yang berfungsi untuk mengukur kinerja organisasi dan ASN secara berkelanjutan. Evaluasi yang objektif dan sistem kontrol yang transparan membantu memastikan bahwa ASN bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas mereka. Akuntabilitas yang tinggi di kalangan ASN berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi publik, karena setiap ASN memahami bahwa kinerjanya akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Hal ini juga mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil.

### **3.2 Peran Kantor Staf ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengimplementasikan Manajemen Strategik**

Kantor Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan manajemen strategis di tingkat pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, kantor ini berfungsi sebagai pusat konsultasi dan advis bagi gubernur dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, hukum dan politik di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh Kantor Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara dalam implementasi manajemen strategis

- a. **Penasehat Kebijakan dalam Perumusan Strategi**  
Kantor Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara berperan sebagai penasehat utama bagi gubernur dalam perumusan strategi pemerintahan. Ini termasuk memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan data dan fakta yang relevan terkait isu-isu pemerintahan yang ada. Dalam konteks manajemen strategis, staf ahli membantu gubernur dalam menyusun visi, misi, dan sasaran strategis yang akan menjadi dasar bagi seluruh kebijakan dan program pemerintahan daerah. Peran ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan visi dan misi gubernur, tetapi juga berdasarkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
- b. **Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Strategi**  
Setelah strategi dan kebijakan pemerintahan dirumuskan, Kantor Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasinya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah dirumuskan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul selama implementasi, sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Dengan pengawasan yang efektif, Kantor Staf Ahli memastikan bahwa implementasi strategi pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan awal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.
- c. **Koordinasi Antar Sektor**  
Implementasi manajemen strategis dalam pemerintahan sering kali melibatkan berbagai sektor dan unit kerja di pemerintahan daerah. Kantor Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara berperan dalam mengkoordinasikan berbagai sektor ini untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih tugas atau konflik kepentingan antar sektor, sehingga implementasi strategi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, koordinasi juga membantu dalam menyinkronkan program-program lintas sektor agar sejalan dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.
- d. **Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti**  
Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berbasis pada bukti dan data yang akurat. Ini berarti bahwa sebelum sebuah kebijakan diambil, dilakukan analisis mendalam tentang berbagai aspek yang terkait, seperti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan berbasis bukti ini, manajemen strategis yang dijalankan menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peran ini sangat krusial dalam memastikan bahwa strategi pemerintahan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau opini semata, tetapi juga pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- e. **Pengembangan Kapasitas Pemerintahan**  
Selain itu, Kantor Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara juga berperan dalam pengembangan kapasitas ASN dan unit kerja di pemerintahan daerah. Pengembangan kapasitas ini mencakup pelatihan, pembinaan, dan penguatan kompetensi ASN agar mereka mampu mendukung implementasi manajemen strategis dengan lebih baik. Dengan meningkatkan kapasitas ASN, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada mampu beradaptasi dengan tuntutan strategis yang berubah-ubah.
- f. **Mediator dalam Pemangku Kepentingan**  
Dalam manajemen strategis, keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah hal yang penting. Kantor Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara berperan sebagai mediator antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan memfasilitasi dialog dan kerjasama antar pihak, kantor ini memastikan bahwa implementasi strategi mendapat dukungan luas dan sesuai dengan kepentingan bersama.

#### **4. Simpulan**

Penerapan manajemen strategis memiliki keterkaitan yang erat dengan keadaan ASN saat ini. Manajemen strategis yang baik dapat memberikan arah yang jelas, meningkatkan kompetensi, dan memotivasi ASN untuk bekerja lebih efektif. Namun, tantangan dalam manajemen strategis, seperti birokrasi kaku dan resistensi terhadap perubahan, juga mencerminkan berbagai isu yang dihadapi oleh ASN. Untuk mengoptimalkan kinerja ASN, diperlukan penerapan manajemen strategis yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan ASN, serta dukungan yang memadai dalam menghadapi perubahan.

Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara memainkan peran yang krusial dalam mengimplementasikan manajemen strategis di tingkat pemerintahan daerah. Melalui perannya sebagai penasihat kebijakan, pengawas implementasi, koordinator antar sektor, pengembang kapasitas, dan mediator pemangku kepentingan, kantor ini memastikan bahwa strategi pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan visi serta misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara berkontribusi signifikan dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Akhmad. (2017). Studi Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 136849. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2476>

- Almashyakhi, A. M. (2022). An Evidence-Based Review of e-HRM and Its Impact on Strategic Human Resource Management. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 10(03), 542–556. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2022.103033>
- Dewie Tri Wijayati. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit (Studi Manajemen Strategik pada Dinas Propinsi Jawa Timur). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), 24–32.
- Fathya, V. N. (2017). Reformasi Manajemen SDM Aparatur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 49–56.
- Faujiah, S., Syaifudin, M., & Andriani, T. (2023). Implementasi Manajemen Strategi dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 641–650. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1400>
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Peran Pemimpin dalam Pencapaian Tujuan Organisasi: Studi Pada DPD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.175>
- Ilyas, I., Marlinda, C., Herman, H., Marhalinda, & Satriadi. (2023). *Manajemen Strategi*. CV. Azka Pustaka.
- Ismail, M. S. (2021). *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Penerbit Qiara Media.
- Kadarisman, M. (2019). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(1), 17–32. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.202>
- Kalangi, R. (2015). Pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi ...)*, 2, 1–18.
- Lapalelo, B., Mambu, L., & Imran, T. (2024). Analisis Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Tondano Barat Kabupaten Minahasa. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18925–18934.
- Listiani, T. (2011). Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 8(3), 312–321.
- Oja, H. (2016). Penerapan Manajemen Strategi dalam mewujudkan kinerja organisasi sektor publik. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 5(1), 1–11.
- Prastiwi, S., & Meirinawati. (2016). Manajemen Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Dalm Mengembangkan Potensi Objek Wisata Edukasi Little Teksas Wonocolo. *Publika*, 4(11).
- Rahmawati, S. D., Sholikhah, V., & Huda, M. N. (2019). Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat di Kementerian Agama



Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 1(2), 170–183.  
<https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.170-183>

Ramli, Y., & Kartini, D. (2023). *Manajemen Strategik dan Bisnis*. Bumi Aksara.

Rosiadi, A., Setiawan, M., & Moko, W. (2018). Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 156–169. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2208>

Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo.

Setijabudi. (2010). Peningkatan Kinerja Layanan Organisasi Publik Melalui Penerapan Manajemen Stratejik. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 19–26.

Siswoyo, M., Permana, I., & Jafar, L. A. (2020). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira, April*, 31–42.

Suaedi, F. (2019). *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan*. Airlangga University Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Yulianti, D. (2018). *Buku Ajar Manajemen Strategi Sektor Publik*. Pusaka Media.

Yunus, E. (2016). *Manajemen Strategis*. Penerbit Andi.